

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari waktu ke waktu Pemerintah Indonesia sedang terpacu untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam rangka menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Pemerintah mempunyai peran utama sebagai penggerak dalam pembangunan, yaitu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan berbentuk fisik tetapi mencakup pembangunan mental bangsa. Pembangunan tersebut tidak mungkin berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan apabila sistem pemerintah tidak dibenahi sedemikian rupa. Karena dengan sistem pemerintahan yang baik dan teraturlah pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sesuai dengan ketetapan MPR No. IV tahun 1973 bahwa dalam rangka usaha peningkatan keselarasan dan keseimbangan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah. Dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan dan kesenimbangan di daerah digunakan adanya perencanaan yang menyeluruh, terarah dan terpadu.

Pemberian otonomi kepada daerah sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 18 ayat 2 yang berbunyi Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Mengingat hal tersebut maka salah satu upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan di daerah adalah dengan membentuk suatu badan yang bertugas khusus dalam perencanaan pembangunan yaitu melalui keputusan Presiden No.27 tahun 1980, tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota) diseluruh tanah air yang kemudian dilebur dengan PP RI No 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah, bagian ke empat pasal 6 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pembangunan ekonomi adalah pembangunan kemakmuran ekonomi negara atau daerah guna kesejahteraan penduduknya. Sistem ekonomi Islam akan membawa masyarakat ke dalam suatu sistem ekonomi berorientasi *falah* atau kesejahteraan bagi umat. Pembangunan merupakan proses perubahan kearah kondisi yang lebih baik dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui suatu upaya yang dilakukan secara terencana. Disinilah peran strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan visi-misi kepala daerah melalui penentuan program/kebijakan prioritas berdasarkan potensi wilayah, permasalahan maupun isu strategi yang ada.

Barenlitbangda adalah Perangkat Daerah yang terbentuk dari dua fungsi penunjang pemerintahan yaitu fungsi Perencanaan dan fungsi Penelitian dan

Pengembangan. Fokus utama adalah untuk menjadi Perangkat Daerah yang profesional dalam Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Suatu tantangan besar yang dihadapi oleh umat Islam saat ini adalah bagaimana membangun ekonominya selaras dengan ideologi agamanya. Negara-negara Islam umumnya tengah menderita keterbelakangan ekonomi secara luar biasa, yaitu tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia, fisik dan alam yang dimilikinya. Akibatnya, kemiskinan, keterbelakangan dan stagnasi ekonomi terjadi dimana-mana. Meskipun negara itu termasuk kaya sumber daya namun ekonominya kurang berkembang. Standar hidup rata-rata penduduknya masih rendah. Bahkan realitas yang memprihatinkan adalah pembangunan dan eksploitasi sumber daya ekonomi hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu saja dari masyarakatnya, dikarenakan konsentrasi ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata.

Model pembangunan ekonomi yang berkembang secara pesat di dunia Barat tidak ada jaminan akan sukses jika diaplikasikan di dunia Muslim. Hal ini dikarenakan perbedaan kulturbudaya, nilai-nilai, pandangan hidup dan ideologi yang berbeda. Teori dan model pembangunan yang dikembangkan di Barat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sekulerisme, liberalisme dan kapitalisme yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Barat. Sementara dunia Muslim menjadikan agama sebagai variabel utama dalam pembangunan ekonomi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada kesamaan model pembangunan antara apa yang

diaplikasikan di dunia Barat dengan dunia Muslim selama tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan utama dari ajaran Islam (*maqāshid syari'ah*).

Pembangunan ekonomi dalam Islam menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama demi memelihara lima maslahat pokok kehidupan manusia, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keterunan dan harta. Setiap individu berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya, agar dapat mempertahankan eksistensi hidup dan menjalankan peran utamanya sebagai khalifah di bumi. Di sisi lain, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, bertindak sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan itu sendiri. Hal ini didasari oleh pandangan dunia Islam yang menempatkan manusia sebagai pelaku utama dalam kehidupan manusia. (Chapra, 2000, hal. 8)

Maqāshid Al-Syarī'ah adalah jantung dalam ilmu ushul fiqh, karena itu *Maqāshid Al-Syarī'ah* menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa pengetahuan *Maqāshid Al-Syarī'ah* menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. *Maqāshid Al-Syarī'ah* tidak hanya diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (*moneter, fiscal, public finance*), tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. *Maqāshid Al-Syarī'ah* juga sangat diperlukan dalam membuat perencanaan pembangunan daerah karena itu menyangkut kemaslahatan manusia. (Mufid, 2016, hal. 186)

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang seharusnya diterapkan di dunia Muslim harus berbasis pada *Maqāṣid Al-Syarī'ah* yaitu terciptanya keadilan distribusi melalui terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar manusia agar dapat menjaga kemaslahatan kehidupan manusia. Pembangunan ekonomi menjadikan manusia sebagai pelaku dan objek utama dari pembangunan itu sendiri seiring fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Pembangunan ekonomi harus menjaga dan melestarikan lima unsur pokok penting, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Perencanaan pembangunan Kota Banjarmasin mengembangkan kemandirian perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya lokal meliputi penurunan disparitas wilayah, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemantapan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pengembangan *smart city*.

Penulis memilih perencanaan daerah Kota Banjarmasin karena sebagai berikut:

1. Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota di Indonesia yang berhasil mendapatkan penghargaan adipura dalam pengelolaan lingkungan perkotaan serta kebersihan.
2. Kota Banjarmasin adalah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan pusat pembangunan di provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kota Banjarmasin adalah salah satu Kota yang mengembangkan konsep *smart city* pada program pengembangan wilayah metropolitan yang disebut Banjarbakula.

Dalam penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut pada perencanaan pembangunan Kota Banjarmasin karena Kota Banjarmasin mendapatkan penghargaan adipura 3 tahun terakhir. Dan perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan visi misi Kota Banjarmasin yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut dengan ini penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Perencanaan Pembangunan Kota Banjarmasin dalam Perspektif *Maqāsid Al-Syarī’ah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan di teliti adalah:

1. Bagaimana Perencanaan Pembangunan Kota Banjarmasin ?
2. Bagaimana Perencanaan Pembangunan Kota Banjarmasin dalam Perspektif *Maqāsid Al-Syarī’ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Perencanaan Pembangunan Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui Perencanaan Pembangunan Kota Banjarmasin dalam Perspektif *Maqāsid Al-Syarī’ah*.

D. Signifikasi Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu terkait penulisan skripsi mengenai perencanaan pembangunan dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi buat peneliti lain yang ingin mengangkat atau mengembangkan masalah serupa.
- c. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam mengisi khazanah pengetahuan, pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dalam bentuk karya tulis ilmiah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih berpikir secara ilmiah dengan berdasarkan pada ilmu yang diperoleh dibangku kuliah.
- b. Bagi kalangan akademik, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan bagi para pembaca terhadap perencanaan pembangunan Kota Banjarmasin dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dan juga dapat digunakan sebagai tambahan informasi serta bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

- c. Bagi tempat penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan Kota Banjarmasin yang lebih maju.
- d. Bagi umum, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perencanaan pembangunan Kota Banjarmasin dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penulisan ini maka penulis perlu memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Perencanaan adalah proses, perbuatan merencanakan (merancang).

(Kebudayaan, 1998/1999, hal. 832)

Yang dimaksud dalam perencanaan disini adalah suatu perencanaan atau sebuah rancangan untuk membangun Kota Banjarmasin dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yakni “Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin Baiman (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan Nyaman)”

2. Pembangunan adalah proses, cara, perbuatan membangun. (Nasional,

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III, 2005, hal. 103)

Yang dimaksud pembangunan disini adalah perbuatan membangun Kota Banjarmasin dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yakni “Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin Baiman (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan Nyaman)”.

3. *Maqāshid Al-Syarī'ah* adalah terdiri dari dua kata yakni *Maqāshid* dan *syariah*. *Maqāshid* adalah bentuk jamak dari *qashada-yaqshidu-qashdan* yang berarti maksud atau tujuan. Sementara *syariah* merupakan bentuk subyek dari akar kata *syara'a* yang artinya adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. (Munawwir, 1997, hal. 1123)

Maksud *Maqāshid Al-Syarī'ah* disini adalah tujuan yang lebih memperhatikan kesejahteraan umum. Yang dilihat dari *al-kulliyat al-khamsah* (lima masalah pokok) yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

F. Kajian Pustaka

Untuk mempertegas posisi penelitian penulis di antara judul yang serupa, maka diperlukan penjelasan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Moh Tahir tahun 2014 di Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “Rekonstruksi Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Umer Chapra”. Penelitian ini menggali pemikiran ketiga tokoh tersebut berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang pembangunan ekonomi Islam menurut Pemikiran Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Umer Chapra sedangkan penulis perencanaan

pembangunan dalam perspektif maqasidi. Persamaannya sama-sama membahas tentang masalah pembangunan ekonomi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Masjudin Ashari tahun 2015 Universitas Mataram yang berjudul “Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013)”. Penelitian ini adanya permasalahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah sebab APBD menggambarkan prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Perbedaanya penulis membahas tentang perencanaan pembangunan kota Banjarmasin dalam perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah* sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis perencanaan pembangunan daerah studi kasus perencanaan partisipatif.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Shadikin tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Maqāshid Syariah terhadap Sistem Keamanan Perbankan pada Program Branchless Banking (Studi di PT.Bank Mandiri tbk Kantor Cabang di Ponegoro Yogyakarta)”. Penelitian ini menganalisis sejauh mana tingkat keamanan program branchless banking yang memanfaatkan jasa pihak ketiga dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat berdasarkan standar sistem keamanan perbankan

dengan tujuan agar dapat memberikan dan meningkatkan kepercayaan nasabah untuk menggunakan layanan jasa keuangan tersebut. Kemudian ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, terutama dari segi perlindungan harta. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas suatu masalah yang ditinjau berdasarkan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yang menguraikan mengenai latar belakang masalah dari masalah yang ditemukan penulis di lapangan, sehingga menjadikan alasan penulis untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan dirumuskan dan dituangkan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk memahami kata-kata yang penulis maksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan penafsiran yang berbeda, kemudian sebagai rujukan dalam penelitian maka diambillah kajian pustaka dari skripsi-skripsi terdahulu agar memudahkan penelitian dan menjaga kebenaran originalitas penulisan, untuk lebih mudah memahami penelitian ini maka disusunlah sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang dapat menjelaskan, menguraikan, dan memformulasikan berbagai elemen teori sehingga membentuk suatu format

pemikiran teoritis yang utuh, logis, kritis dan sistematis. Sehingga dapat menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri atas: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data teknik pengumpulan data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang berisi tentang pemaparan mengenai gambaran umum tentang perencanaan pembangunan Kota Banjarmasin perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang telah dilakukan, terdiri atas kesimpulan dan saran.